

## **BAB II**

### **PANDANGAN JEPANG TERHADAP ANCAMAN LUAR NEGERI**

Dalam lingkungan keamanan global sekarang ini, saling ketergantungan di antara negara-negara telah diperluas dan diperdalam dengan adanya globalisasi serta kemajuan pesat dalam inovasi teknologi. Pada saat yang sama, terdapat risiko yang berkembang bahwa kerusuhan atau masalah keamanan di satu negara atau wilayah tertentu bisa segera berkembang menjadi sebuah tantangan atau faktor ketidakstabilan bagi bagi seluruh masyarakat internasional maupun regional. Bahkan setelah berakhirnya Perang Dingin, konflik antar negarapun tetap terjadi, begitu pula di sekitar Jepang mengakibatkan munculnya *grey zone* atau zona abu-abu akibat dari sengketa maupun hal yang menyangkut dengan keamanan secara regional (Defense M. O., 2016). Trauma atas diluluh lantakkan kedua kota di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dengan bom atom dari sekutu, membuat Jepang berperan aktif bahwa senjata nuklir sangatlah berbahaya. Tentu saja kegiatan yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu uji coba senjata nuklir yang perkembangan nuklir telah dimulai dari tahun 1965 dan terus berkembang sangat pesat hingga saat ini serta seringnya uji coba senjata oleh Korea Utara yang dampaknya terasa hingga ke laut Jepang, tentu saja membuat kekhawatiran yang akan mengancam perdamaian dunia. Sebagai negara yang bersebrangan wilayahnya dengan Korea Utara wajar saja jika sikap Jepang menghadapi respon uji coba senjata oleh Korea Utara merasa khawatir dengan situasi seperti ini. Terhalang oleh Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang tahun 1947, dimana militer

Jepang tidak diperkenankan melakukan kegiatan berbaur militer di luar wilayah Jepang maka Jepang melalui kebijakan luar negerinya yang bersifat soft power berusaha untuk melindungi dirinya dari ancaman luar negeri khususnya yang dilakukan oleh Korea Utara. Bab II ini akan menceritakan mengenai Kebijakan Luar Negeri Jepang.

### **A. Situasi Internasional**

Pasca berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Dingin memunculkan beberapa factor-faktor internasional baru yang lebih kompleks dan dapat memberikan pengaruh kepada negara-negara yang ada di dunia. Khususnya Jepang memberikan perhatian lebih terhadap factor-faktor internasional yang baru dan kompleks ini. Munculnya factor-faktor internasional yang baru dan kompleks ini tak lepas dari peranan atau munculnya actor-aktor baru dalam dunia internasional yang berupa aktor *non-state* menjadikan factor-faktor ini lebih kompleks dan luas. Diplomatic Bluebook 2016 merilis, Jepang perlu melihat situasi internasional untuk mencocokkan kondisi sekarang ini dengan cara apa diplomasi yang harus dilakukan oleh Jepang. Menurut Jepang factor-faktor internasional yang baru dan kompleks tersebut yang dianggap dapat mempengaruhi diantaranya :

#### **a. Perubahan Situasi Internasional**

Sejak awal abad ke 21, meskipun Amerika Serikat masih menempati posisi terkemuka dalam kancah internasional baik dalam segi militer maupun ekonomi, nilai-nilai serta budaya, disisi lain munculnya negara-negara yang baru merdeka pasca berakhirnya perang dunia kedua juga membawa dampak terhadap perubahan keseimbangan di dunia, munculnya

actor-aktor baru lain dan mulai meningkatnya perekonomian serta kekuatan militer seperti yang dimiliki serta dilakukan oleh India dan Tiongkok dianggap memiliki kemampuan dalam melakukan perimbangan dalam kekuatan yang telah ditunjukkan dalam peningkatan perekonomian serta kekuatan militer yang besar, munculnya actor non negara seperti organisasi-organisasi internasional yang memiliki pengaruh serta kehadirannya dianggap dapat memainkan peran yang penting terkait dengan isu-isu internasional juga merupakan aspek yang tidak luput sebagai sarana dalam melakukan strategi diplomasi yang dilakukan oleh Jepang.

b. Munculnya Masalah Keamanan di kawasan Asia Timur

Jepang menganggap terdapat dua poin penting terkait dengan masalah keamanan yang ada di kawasan Asia Timur. Poin pertama yaitu terkait dengan peningkatan yang besar dan pesat kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok sejak tahun 1989 Tiongkok telah memperkuat kekuatan militernya dengan kurangnya transparansi di mana Tiongkok terus meningkatkan anggaran pertahanannya sejak tahun tersebut, tak berhenti disitu saja Tiongkok menjadi sorotan Jepang dikarenakan penyusupan kapal milik pemerintah Tiongkok di Kepulauan Senkaku pada 2015, kemudian kapal milik *Chinese Coast Guard* yang semula kapal pencari dan penyelamat dilengkapi juga dengan meriam yang telah berulang kali menerobos territorial perairan Jepang sejak bulan Desember 2015.

Tiongkok juga melakukan pengembangan sumberdaya secara unilateral di Zona Ekonomi Eksklusif milik Jepang.

. Poin kedua terkait dengan pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara, menganut kebijakan sosialis yang mengutamakan militer atas dasar kebijakannya atau Songun ditambah kebijakan Byungjin yang dilakukan oleh Kim Jong Un membuat Korea Utara semakin aktif dalam mengembangkan, meningkatkan kekuatan serta penelitian dalam bidang militeristik terutama pengembangan senjata rudal dan nuklir. Pengembangan senjata serta uji coba yang sering dilakukan oleh Korea Utara tentu saja ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menganggap ini sebagai ancaman langsung dan serius bagi keamanan Jepang.

c. Terorisme Internasional

Munculnya organisasi terorisme internasional yang memiliki ancaman-ancaman nyata dan serius dengan kedok penyalahgunaan ideologi agama serta menggunakan propaganda online. Ancaman terorisme internasional telah di tunjukkan dengan pengeboman-pengeboman yang memakan korban dari kalangan sipil baik dari negara korban maupun warga negara asing yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan di negara yang menjadi korban dari tindakan terorisme, penyanderaan dan eksekusi dua warga negara Jepang oleh ISIS membuat Jepang perlu ikut berperan dalam mencegah terorisme, rencana yang dilakukan pemerintah Jepang sendiri dalam langkah-langkahnya untuk menangani kasus seperti ini dengan

meninjau kembali agar pasukan Jepang dapat beroperasi diluar Jepang. Sedangkan rencananya tahun 2023 nanti dengan melengkapi paspor warga negara Jepang dengan halaman berbahan bermaterial plastik keras yang mengandung informasi identitas pribadi dari pemilik. Selain itu pemerintah Jepang juga akan melakukan sentralisasi dalam pembuatan paspor (Nandarson, 2016).

d. Munculnya Isu-isu Global yang perlu penanganan dengan cepat

Munculnya permasalahan yang harus cepat dan tanggap untuk ditangani bersama seperti pengungsi yang meningkat secara drastis beberapa tahun terakhir terutama diakibatkan oleh konflik, ketidakstabilan politik yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika yang menjadikan kedua wilayah tersebut menjadi sumber dari pengungsi, penyebaran penyakit menular juga menjadi salah satu isu yang bisa mempengaruhi, penyakit yang berasal dari negara lain yang dianggap dapat menular seperti gigitan nyamuk Zika, *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*. Globalisasi membawa dampak yang sangat besar bagi negara-negara yang ada di dunia tak terkecuali dengan negara maju, akibat dari globalisasi ini juga memunculkan masalah terkait dengan isu perubahan iklim yang tentunya tidak bisa ditangani sendiri dan perlunya kerjasama antar negara untuk bersama-sama mencegah serta mengantisipasi kemungkinan akibat dari perubahan iklim dunia. Ketiga poin diatas seperti pengungsi, wabah penyakit menular, isu terkait perubahan iklim merupakan hal yang tidak luput dari sorotan Jepang

sebagai bagian dari masyarakat internasional yang perlu penanganan dengan cepat dan dilakukan bersama-sama.

- e. Resiko dan Peluang terkait Ekonomi Internasional di sekitar Jepang
- Tiongkok beserta negara-negara di kawasan Asia – Pasifik merupakan wilayah yang di sekitar Jepang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi dan akan terus tumbuh diiringi juga dengan pembangunan infrastruktur yang kuat, maka dari itu wilayah Asia – Pasifik merupakan ladang investasi baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang bagi Jepang. (Japan M. o., DIPLOMATIC BLUEBOOK 2016, 2016).

### **B. Prinsip Kebijakan Luar Negeri Jepang**

Pembukaan Konstitusi Jepang 1946 dengan jelas menyebutkan Jepang merupakan negara yang cinta akan perdamaian serta mengakui bahwa semua bangsa yang ada di dunia memiliki kehidupan yang bebas, damai dan berusaha untuk mewujudkan perdamaian, menghapus tirani, perbudakan serta penindasan. Jepang menyikapi munculnya factor-faktor internasional yang baru tersebut sebagai strategis sarana diplomasi dalam menghadapi situasi internasional. Melihat pada factor- factor yang berasal dari sisi internasional tersebut, menurut Kementrian Luar Negeri Jepang, untuk melindungi, mempromosikan serta memenuhi kepentingan nasionalnya Jepang memiliki tiga pilar yang menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Jepang yang akan terus dipertahankan, yaitu (Japan M. o., International Situation and Japan Diplomacy in 2015, 2015) :

## Memperkuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat

Kebijakan aliansi anatar Jepang dengan Amerika Serikat merupakan hal terpenting dalam diplomasi Jepang. Dalam kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat ini bertujuan untuk stabilitas serta kemakmuran Jepang tetapi juga untuk menyeimbangkan stabilitas, kemakmuran serta kebijakan yang ada di kawasan Asia Pasifik, dengan cara Jepang terus memperkuat aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat di semua bidang yang memiliki pedoman konsisten dalam hukum internasional,serta kegiatan yang dilakukan sesuai dengan konstitusi dari masing-masing negara (Japan M. o., The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation, 2015).

Kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Amerika Serikat pada bulan april 2015 untuk menegaskan kembali bahwa Jepang dan Amerika Serikat akan terus memenuhi peran utama dalam memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan di seluruh dunia. "Menuju Aliansi Harapan" merupakan pidato Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang disampaikan dalam Rapat Gabungan Kongres Amerika Serikat pada pertemuan APEC mengemukakan disepakatinya untuk membangun serta mewujudkan kawasan perdamaian serta kemakmuran di kawasan Asia Pasifik dengan aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat sebagai dasar mewujudkan perdamaian kawasan di Asia Pasifik (Abe, 2015). Bentuk dari Aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat yang baru telah diwujudkan dalam relokasi pangkalan udara militer Amerika Serikat di Futenma menjadi ke Henoko (BBC, BBC Indonesia, 2016).

## **Meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga**

Dalam menciptakan lingkungan sekitar yang stabil, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangganya merupakan hal dasar yang penting. Jepang-Tiongkok- Korea Selatan mengadakan Trilateral Summit pada bulan November di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam hampir tiga setengah tahun. Ketiga pemimpin menegaskan kembali bahwa kerjasama trilateral telah benar-benar dipulihkan dan menegaskan kembali bahwa KTT Trilateral adalah untuk diadakan secara teratur.

Perlu diketahui bahwasannya hubungan Jepang dengan Tiongkok merupakan salah satu hubungan bilateral Jepang yang paling penting (Japan M. o., Ministry of Foreign Affairs Japan, 2016). Kedua negara berbagi tanggung jawab untuk perdamaian dan stabilitas kawasan dan masyarakat internasional. Setelah serangkaian pertemuan KTT dan pertemuan menteri luar negeri yang diadakan pada tahun sebelumnya, hubungan Jepang-Tiongkok membaik secara keseluruhan. Jepang akan terus terlibat dalam dialog dan kerjasama di berbagai bidang dan berusaha untuk lebih mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan umum strategis.

Korea Selatan adalah tetangga Jepang yang paling penting yang berbagi kepentingan strategis. Pada kesempatan dari Jepang-Tiongkok- Korea Selatan Trilateral Summit pada bulan November, pertemuan puncak Jepang- Korea Selatan diadakan untuk pertama kalinya sejak pelantikan pemerintahan Shinzo Abe dan President Park menegaskan bahwa mereka akan mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin untuk melaksanakan perjanjian ini, dan menangani

berbagai masalah berdasarkan semangat perjanjian ini. Dalam terang perjanjian ini, Pemerintah Jepang akan bergerak ke arah pengembangan era baru hubungan Jepang- Korea Selatan berorientasi masa depan (Japan M. o., Japan-U.S.-ROK Trilateral Foreign Ministers' Meeting, 2015).

Tak hanya untuk memperdalam hubungan kerjasama dengan mitra berbagi nilai-nilai seperti kebebasan dan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. Jepang dan Australia, berbagi nilai-nilai umum dan kepentingan strategis, Jepang terus memperluas dan memperdalam kerjasama dengan Australia,. Berkenaan dengan India, Jepang melakukan pengembangan hubungan bilateral yang merupakan awal dari sebuah era baru dalam hubungan Jepang-India, hal tersebut terbukti dengan pertemuan antara Perdana Menteri Abe dan Perdana Menteri Modi selama kunjungan Perdana Menteri Abe ke India pada bulan Desember (Japan M. o., Prime Minister Abe Visits India, 2015).

Hubungan kerjasama antara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN sedang lebih ditingkatkan di bidang yang luas melalui kunjungan timbal balik VIP termasuk oleh para pemimpin dan pertemuan puncak antara Jepang dan ASEAN (Japan M. o., Japan-ASEAN Relations, 2016).

Hubungan Jepang dengan Rusia, dengan Jepang mengadakan Summit Pertemuan dengan Rusia dua kali pada tahun 2015. Selanjutnya, sehubungan dengan Isu Wilayah Utara, yang merupakan keprihatinan terbesar antara Jepang dan Rusia, kunjungan Menteri Luar Negeri Kishida ke Rusia pada bulan September menandai dimulainya kembali negosiasi untuk kesimpulan dari perjanjian damai. Perjanjian dengan Rusia melalui resolusi isu atribusi dari empat

Kepulauan Mariana, Jepang akan melipat gandakan upaya negosiasi dan secara proaktif terlibat dalam dialog politik dengan Rusia melalui berbagai kesempatan (Japan M. o., Japan-Russia Relations, 2016).

Mengenai hubungan dengan Korea Utara, Jepang sangat mengutuk uji coba nuklir pada bulan Januari 2016 yang dilakukan oleh Korea Utara dan serentetan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Sesuai dengan Deklarasi Jepang-DPRK Pyongyang, Jepang akan terus bekerja menuju resolusi komprehensif mengenai isu yang beredar seperti penculikan warga negara asing dan permasalahan nuklir dan rudal. Sebagai isu kritis mengenai kedaulatan Jepang dan kehidupan dan keselamatan warga Jepang, penculikan oleh Korea Utara merupakan masalah universal di antara masyarakat internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai hal tersebut Jepang akan membuat isu penculikan sebagai salah satu isu kebijakan luar negeri paling penting dalam kerjasama dengan masyarakat internasional (Japan M. o., Japan-North Korea Relations, 2016).

### **Memperkuat diplomasi ekonomi Jepang**

Dimulainya perang dingin membawa babak baru bagi wajah diplomasi, diplomasi yang bersifat militeristik mulai ditinggalkan dan beralih ke diplomasi yang lebih lembut. Jepang yang secara tidak langsung dilucuti persenjataan atau kemampuan militernya yang tertuang pada Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang sebelum amandemen membuat Jepang harus memikirkan bagaimana cara membangun kembali hubungan yang baik dengan negara-negara di sekitarnya serta menunjukkan kepada dunia bahwasannya Jepang sekarang ini bukanlah

Jepang yang memiliki sifat agresive dan militeristik. Selain itu pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang lebih condong membangun ekonominya dari pada membangun keamanannya, hal tersebut dibuktikan dengan pengimplementasian Yoshida Doctrine, doktrin tersebut di buat oleh Yoshida Shigeru yang merupakan perdana menteri Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Dalam Yoshida Doctrine dikatakan bahwa Jepang akan berfokus kepada pemulihan dan perumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua, perlindungan keamanan serta pertahanan Jepang oleh Amerika Serikat, jelas dalam hal tersebut bahwa Jepang pada awal masa kekalahan memfokuskan pada ekonominya, menjadikan hal tersebut sebagai alat dalam diplomasi Jepang dikemudian hari. Dewasa ini ekonomi merupakan cara diplomasi yang paling sering dilakukan oleh Jepang. Diplomasi melalui jalur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang adalah salah satu kebijakan prioritas Jepang. Untuk Jepang, negara maritim dengan sumber daya yang langka, itu sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan ekonomi internasional yang terbuka dan stabil berdasarkan aturan. Untuk mendapatkan kembali Jepang yang kuat dan merevitalisasi ekonomi, Jepang mengambil keuntungan dari berbagai kerangka internasional mengenai ekonomi, seperti G7, Kelompok Dua Puluh (G20), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan APEC, untuk berkontribusi membentuk tatanan ekonomi internasional.

Kesepakatan prinsip tercapai pada bulan Oktober 2015 Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP), yang menciptakan zona ekonomi tunggal yang

melibatkan penduduk sekitar 800 juta dan hampir 40% dari PDB dunia. Ditandatangani pada bulan Februari 2016. Perjanjian TPP, yang menetapkan aturan abad ke-21 di berbagai bidang, termasuk tidak hanya bea cukai atas barang, tetapi juga jasa, investasi, kekayaan intelektual dan BUMN, diharapkan untuk memberikan standar baru untuk aturan perdagangan dan investasi dunia. Perjanjian bilateral Kemitraan Ekonomi (EPA) pada tahun 2015, seperti berlakunya Jepang-Australia EPA dan penandatanganan Jepang-Mongolia EPA. Dengan cara ini, dasar dari menggabungkan vitalitas pasar luar negeri yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi Jepang telah sedang terus dibangun. Dalam rangka untuk memasuki pertumbuhan negara-negara lain, termasuk negara-negara berkembang, melalui kegiatan di luar negeri perusahaan Jepang, sektor publik dan swasta harus bekerja sama. Jadi Perdana Menteri Abe dan Menteri Luar Negeri Kishida telah mengambil inisiatif untuk secara proaktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Divisi Promosi Public-Private Partnership didirikan pada MOFA pada bulan September untuk komprehensif mempromosikan operasi bisnis koperasi publik-swasta. Jepang akan terus mempromosikan ekspor sistem infrastruktur di bawah kerjasama sektor publik dan swasta. Secara khusus, investasi infrastruktur adalah untuk dipromosikan terutama di wilayah Asia melalui “The Partnership for Quality Infrastructure” yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang mudah digunakan dan tahan lama serta ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana (Japan M. o., International Situation and Japan Diplomacy in 2015, 2015).